



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIFLI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 510424

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 5.125.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/200 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
7. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BANGKA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 45.000.000**



1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR 250 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.469.977

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.199.469.977

III. HUTANG Rp. 114.603.180

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.084.866.797

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.